

***THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAX SANCTIONS, TAXPAYER AWARENESS,
MODERNIZATION OF THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM ON MOTOR VEHICLE
TAXPAYER COMPLIANCE IN YOGYAKARTA CITY SAMSAT***

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK,
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KOTA YOGYAKARTA**

¹⁾ Dzikrina Shaumi Rahmawati, ²⁾ Eliya Isfaatun

^{1) 2)} Universitas Nusa Megarkencana

¹⁾ dzikrinasr4@gmail.com, ²⁾ isfaatuneliya@gmail.com

Abstract

Motor vehicle tax is the highest source of income in the DI Yogyakarta Region with tax realization in 2022 up to 102% of IDR 961 billion of the total PAD target of 2.2 trillion. This success cannot be separated from the various efforts that have been made by the government, apart from that there are other factors that influence taxpayer compliance. This study aims to determine the influence of tax knowledge, tax sanctions, taxpayer awareness, and modernization of the tax administration system on motor vehicle taxpayer compliance in the Yogyakarta City Samsat.

The number of samples used in the study was 100 respondents calculated based on the slovin formula with the accidental sampling method. Data collection was carried out using a questionnaire method distributed using a google form and processed using SPSS statistics. The research methods used to achieve this study include descriptive statistical analysis, data quality testing (validity test, reliability test), classical assumption test (normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test), multiple linear regression analysis test, operational hypothesis (partial t test, simultaneous F test, determination coefficient test).

The results of this study indicate that tax knowledge and tax sanctions have a positive and significant effect, while taxpayer awareness and modernization of the tax administration system do not have a significant effect on taxpayer compliance. Tax knowledge, tax sanctions, taxpayer awareness, and modernization of the tax administration system simultaneously have a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance at the Samsat of Kota Yogyakarta.

Keywords: motor vehicle taxpayer compliance, taxpayer knowledge, tax sanctions, taxpayer awareness, modernization of the tax administration system.

A. PENDAHULUAN

Sebuah negara perlu melakukan pengembangan dan pemeliharaan negaranya secara terus menerus, baik dari skala nasional maupun regional. Pembangunan negara tersebut ditujukan untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam proses pembangunan tersebut tentu perlu adanya anggaran biaya yang tidaklah sedikit, oleh karena itu negara perlu pemasukan tetap negara. Dalam hal ini Pajak sangat dibutuhkan oleh negara karena pajak menjadi salah satu sumber pendapatan nasional terbesar yang menyumbangkan sekitar 80% dari total pemasukan dana negara Indonesia. Pada tahun 2023 pendapatan negara yang bersumber dari perpajakan mencapai Rp2.155,42 triliun dari total pendapatan negara Rp2.774,30 triliun (djp.kemenkeu.go.id)

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara bagi orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian pajak tersebut menyatakan bahwa semakin banyak warga negara yang membayarkan kewajibannya maka akan semakin banyak juga pendapatan yang terkumpul oleh negara untuk biaya pembangunan dan pemeliharaan.

Dalam pengelolaannya pajak terbagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Menurut UU No 28 tahun 2009 pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, tepatnya dikelola oleh direktorat jenderal pajak. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah setingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Tepatnya dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak daerah sendiri terdiri dari 5 jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Dari 5 jenis pajak daerah, pajak kendaraan bermotor menjadi sumber pendapatan tertinggi di Wilayah DI Yogyakarta dengan realisasi pajak pada 2022 sebesar Rp953 milyar dari total target PAD 2,2 triliun (harian jogja) hampir memenuhi setengah dari total PAD di DIY.

Instansi pemerintah yang mempunyai wewenang untuk memungut pajak kendaraan bermotor adalah Samsat (Sistem administrasi manunggal satu atap). Samsat ini berguna untuk memperlancar serta mempercepat pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Fungsi dari adanya Samsat adalah sebagai lembaga atau unit pelayanan yang bertanggungjawab atas pendaftaran, pembayaran pajak, dan administrasi kendaraan bermotor di Indonesia.

Samsat merupakan salah satu bentuk kerjasama antara PT Jasa Raharja (persero), Dinas Pendapatan Provinsi, dan Polda. Sebelum adanya Samsat proses pembayaran pajak kendaraan bermotor membutuhkan waktu yang cukup lama karena wajib pajak harus mendatangi 3 lembaga tersebut, oleh karena itu hadirnya Samsat sangat mempermudah wajib pajak untuk membayarkan pajaknya.

Kota jogja merupakan kota pelajar sekaligus kota wisata dimana kota ini menjadi central berkumpulnya banyak orang dengan tujuan yang berbeda beda. Saban hari kota jogja menjadi semakin ramai dibuatnya, dan seiring dengan hal tersebut pemakai jalanan di kota jogja juga tentunya semakin banyak. Berikut data pengguna jalan di DIY dari tahun 2019 hingga 2021

Data pengguna jalan di DIY tahun 2019-2021

No	Jenis Kendaraan	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Mobil Penumpang	372.436	385.269	400.627
2	Bus	13.081	13.351	13.398
3	Truk	76.271	79.153	82.475
4	Sepeda Motor	2.918.976	3.020.175	3.125.720
	Jumlah	3.380.764	3.497.948	3.622.220

Sumber: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2022

Realisasi anggaran pajak kendaraan bermotor di DIY pada tahun 2022 mencapai 102% dengan nominal 961 milyar, sudah melebihi angka sempurna namun kalau ditilik dari sisi wajib pajak yang tidak membayarkan kewajibannya ada sebanyak 68.847 kendaraan dengan klasifikasi sebagai berikut roda empat sebanyak 4.509 dan roda dua sebanyak 64.338 unit, terhitung dari 2015 hingga 25 Juli tahun 2022 (BPKAD DIY di Tribun Jogja)

Realisasi pajak kendaraan bermotor yang dicapai oleh DIY sangat unggul jika dibandingkan dengan pajak daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah agar masyarakatnya melek dan patuh akan perpajakan dimana bisa membantu pendapatan daerah yang selanjutnya biaya itu pula yang akan dinikmati oleh masyarakat secara tidak langsung melainkan dengan adanya fasilitas umum yang telah dibangun oleh pemerintah.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah pemutihan, adanya sosialisasi perpajakan, Samsat keliling, samsat corner, E- Samsat, adanya sanksi pajak dll. dari sekian upaya tersebut beberapa diantaranya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Jerry Heriantoni, Firman Adi Nugroho, Muhammad Rafli Farandy, Iin Nur Ainiyah, dan Abel Fatah Rizqi Darmawan dengan variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak, dan modernisasi sistem administrasi telah membuktikan bahwa

variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penelitian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di daerah penelitiannya. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah faktor-faktor tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Yogyakarta

B. KAJIAN LITERATUR

1. Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan terkait dengan suatu individu yang memperhatikan tingkah laku seseorang, dan individu berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara faktor internal maupun faktor eksternal (Robbins & Judge, 2008).

2. Pengertian Pajak

Pajak menurut UU no 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU tanpa mendapatkan keuntungan langsung yang dapat digunakan dalam membayar pengeluaran umum. Dengan demikian pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang digunakan untuk kepentingan rakyat.

3. Kendaraan Bermotor

Menurut UU No 1 tahun 2022 kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

4. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang tertuang dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.

5. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai 4 fungsi (dilansir dalam DJP) sebagai berikut :

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*)
- b. Fungsi mengatur (*regulated*)
- c. Fungsi stabilitas
- d. Fungsi redistribusi pendapatan

6. Kepatuhan Pajak

Menurut (Hasanudin et al., 2020) tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat dipahami dalam kewajiban wajib pajak untuk

menyetor kembali SPT dan kepatuhan dalam memperkirakan tunggakan pajak yang harus dibayar. Bilamana tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tinggi, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga terus meningkat. Dalam artian wajib pajak yang telah patuh untuk membayarkan pajaknya, akan membawa dampak positif bagi negara dan juga masyarakat. Contohnya seperti pembangunan negara yang akan terlaksana dengan baik dan tercapainya target penerimaan dalam sektor pajak.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang didapat langsung dari responden dengan cara mengisi kuesioner dalam link <https://bit.ly/surveykepatuhanpajak> dan dari kajian literatur yang ada. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Yogyakarta per tahun 2024 dengan jumlah 576.016. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus slovin dengan hasil 100 responden dan pengambilan data menggunakan metode *accidental sampling* dengan kriteria wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Yogyakarta

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan independen. Dimana variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Pengujian data dalam penelitian ini melalui beberapa proses yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa data yang didapat sudah sesuai. Kemudian terdapat uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas untuk menguji apakah data terdistribusi dengan normal dan tidak terjadi korelasi antar variabel maupun kesamaan variabel. Selanjutnya dilakukan uji analisis regresi liner berganda untuk memperoleh gambaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi linear berganda dinyatakan dalam sebuah persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
A	= konstanta
B _{1,2,3,4}	= koefisien regresi
X ₁	= pengetahuan pajak
X ₂	= sanksi pajak
X ₃	= kesadaran pajak
X ₄	= modernisasi sistem administrasi perpajakan

Selanjutnya dilakukan uji hipotesa yang terdiri dari uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi. Uji hipotesa ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara partial dengan menggunakan uji t dan secara partial menggunakan uji f. uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran umum dari variabel yang digunakan dalam penelitian. Analisis statistika deskriptif ini menggunakan

nilai minimum, nilai maximum, rata-rata, dan standar deviasi atas jawaban responden dari setiap variabel. Dengan hasil sebagai berikut :

Analisis statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. deviation
Pengetahuan perpajakan	100	12	25	21,14	3,207
Sanksi pajak	100	10	20	16,80	2,811
Kesadaran wajib pajak	100	12	25	20,75	3,491
Modernisasi sistem administrasi perpajakan	100	5	25	17,44	4,356
Kepatuhan pajak	100	10	20	17,39	2,647

Sumber: Data primer diolah, 2024

Penelitian ini sudah memenuhi uji instrumen diantaranya uji validitas yang memiliki nilai r hitung $>$ r tabel sehingga pernyataan dalam kuesioner yang digunakan dinyatakan valid dan uji reliabilitas yang memiliki nilai *cronbach alpha* lebih besar.

2. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji valid atau tidaknya kuesioer yang dibagikan kepada responden. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel. Uji validitas ini menggunakan korelasi pearson dan uji 2 tail. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel sebanyak 100 responden, sehingga diperoleh nilai $df = 100-2 = 98$ dengan kriteria r tabel pada tingkat signifikansi 5%. Maka nilai r tabel yang digunakan adalah 0,197.

Uji validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	keterangan
Pengetahuan pajak	X1.1	0,713	0,197	Valid
	X1.2	0,768	0,197	Valid
	X1.3	0,756	0,197	Valid
	X1.4	0,740	0,197	Valid
	X1.5	0,735	0,197	Valid
Sanksi pajak	X2.1	0,819	0,197	Valid
	X2.2	0,899	0,197	Valid
	X2.3	0,880	0,197	Valid
	X2.4	0,830	0,197	Valid
Kesadaran wajib pajak	X3.1	0,763	0,197	Valid
	X3.2	0,665	0,197	Valid
	X3.3	0,777	0,197	Valid
	X3.4	0,813	0,197	Valid
	X3.5	0,773	0,197	Valid
Modernisasi sistem administrasi perpajakan	X4.1	0,880	0,197	Valid
	X4.2	0,894	0,197	Valid
	X4.3	0,933	0,197	Valid
	X4.4	0,754	0,197	Valid
	X4.5	0,826	0,197	Valid
Kepatuhan wajib pajak	Y1	0,839	0,197	Valid
	Y2	0,794	0,197	Valid
	Y3	0,847	0,197	Valid
	Y4	0,848	0,197	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui besarnya koefisien korelasi dari tiap poin pertanyaan kuesioner. Berdasarkan data tersebut dinyatakan bahwa instrumen pertanyaan

tiap variabel bernilai valid karena memiliki signifikansi pearson correlation yang lebih besar dari r tabel, dimana nilai r tabel sebesar 0,197. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tiap instrumen pertanyaan yang digunakan bernilai valid karena memenuhi kriteria validitas yaitu $r_{hitung} > r_{tabel}$.

3. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat diandalkan. Dalam penelitian ini uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan sudah memenuhi syarat reliabel. Suatu kuesioner dapat dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai cronbach alpha lebih dari 0,5 atau 50%.

Uji reliabilitas

Variabel	Cronbach alpha	Keterangan
Pengetahuan pajak (X1)	0,790	Reliabel
Sanksi pajak (X2)	0,878	Reliabel
Kesadaran wajib pajak (X3)	0,812	Reliabel
Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X4)	0,911	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,844	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena telah memenuhi minimal koefisien cronbach alpha yaitu 0,5 atau 50%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen untuk penelitian selanjutnya.

4. Uji normalitas

Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (k-s). Data dapat dikatakan terdistribusi normal ketika data tersebut memiliki nilai probabilitas signifikan di atas 0,05.

Uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.91314484	
Most Extreme Differences	Absolute	.088	
	Positive	.078	
	Negative	-.088	
Test Statistic		.088	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.054	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.055	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.050
		Upper Bound	.061

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terdistribusi normal, karena nilai probabilitas signifikan yang dihasilkan adalah 0,054 dan lebih besar dari nilai probabilitas signifikan 0,05. Oleh karena itu model regresi ini layak untuk digunakan analisis selanjutnya.

5. Uji heteroskedastisitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan terdapat korelasi antar variabel bebas. Model regresi dikatakan baik ketika tidak ada korelasi antar variabel bebas. Data penelitian dinyatakan bebas multikolinearitas ketika $VIF < 10$ dan nilai tolerance $> 0,10$

Uji heteroskedastisitas

Variabel	Collinearity statistic		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pengetahuan pajak (X1)	0,437	2,290	Bebas multikolinearitas
Sanksi pajak (X2)	0,576	1,735	Bebas multikolinearitas
Kesadaran wajib pajak (X3)	0,486	2,056	Bebas multikolinearitas
Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X4)	0,917	1,090	Bebas multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai toleransi $> 0,1$ dan nilai $VIF < 10$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan bebas dari multikolinearitas.

6. Uji multikolinearitas

Uji heteroskedastisitas digunakan dalam model regresi untuk menguji apakah ada ketidaksamaan variance dari residu pengamatan satu dengan pengamatan lainnya. Pengujian ini menggunakan uji glejser dengan tingkat signifikansi 0,05, sehingga model regresi dapat dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05.

Uji multikolinearitas

No	Variabel	Asymp. Sig	Keterangan
1	Pengetahuan pajak (X1)	0,057	Tidak terjadi heteroskedastisitas
2	Sanksi pajak (X2)	0,336	Tidak terjadi heteroskedastisitas
3	Kesadaran wajib pajak (X3)	0,550	Tidak terjadi heteroskedastisitas
4	Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X4)	0,308	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan dari tiap variabel memiliki nilai yang lebih dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

7. Uji regresi linier berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat.

Uji regresi linier berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.563	1.476		3.090	.003
	Pengetahuan Pajak	.363	.093	.440	3.923	<.001
	Sanksi Pajak	.190	.092	.202	2.063	.042
	Kesadaran Wajib Pajak	.112	.081	.148	1.390	.168
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	-.021	.047	-.035	-.449	.654

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2024

Pada tabel hasil uji regresi linier berganda pada tabel di atas yang digunakan adalah pada kolom b, nilai konstanta (a), dan nilai konstanta variabel independen. Berikut adalah persamaan yang dihasilkan dari tabel tersebut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 4,563 + 0,363 X_1 + 0,190 X_2 + 0,112 X_3 + (-0,021) + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas, maka analisis regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Persamaan regresi linier berganda memiliki konstanta sebesar 4,563 yang menunjukkan bahwa variabel independen (pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 4,563.
- Koefisien variabel pengetahuan pajak (X_1) sebesar 0,363 yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan variabel pengetahuan pajak (X_1) sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,363 satuan dengan asumsi variabel lain tetap konstan atau tidak mengalami perubahan
- Koefisien variabel sanksi pajak (X_2) sebesar 0,190 yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan variabel sanksi pajak (X_2) sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,190 satuan dengan asumsi variabel lain tetap konstan atau tidak mengalami perubahan
- Koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X_3) sebesar 0,112 yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan variabel kesadaran wajib pajak (X_3) sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,112 satuan dengan asumsi variabel lain tetap konstan atau tidak mengalami perubahan
- Koefisien variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_4) sebesar -0,021 yang dapat diartikan bahwa setiap kenaikan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_4) sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan turun sebesar 0,021 satuan dengan asumsi variabel lain tetap konstan atau tidak mengalami perubahan

8. Uji t partial

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan pada uji t ini adalah sebagai berikut:

- a. Apabila t hitung $>$ t tabel atau nilai signifikan $<$ 0,05 maka Hipotesis diterima
 b. Apabila t hitung $<$ t tabel atau nilai signifikan $>$ 0,05 maka hipotesis ditolak

$$\begin{aligned} \text{Rumus hitung } T \text{ tabel} &= a/2 : n-k-1 \\ &= 0,05/2 : 100-4-1 \\ &= 0,025 : 95 \\ &= 1,98525 \text{ (tabel distribusi } t) \end{aligned}$$

Uji t partial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.563	1.476		3.090	.003
	Pengetahuan Pajak	.363	.093	.440	3.923	<.001
	Sanksi Pajak	.190	.092	.202	2.063	.042
	Kesadaran Wajib Pajak	.112	.081	.148	1.390	.168
	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	-.021	.047	-.035	-.449	.654

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan pada penelitian ini bahwa:

- a. **Pengujian Hipotesis Pertama**
 Variabel pengetahuan pajak (X1) dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sehingga hipotesis pertama diterima. Hal tersebut dikarenakan pengaruh pengetahuan pajak (X1) terhadap kepatuhan pajak memiliki nilai signifikan $<$ 0,05 yaitu sebesar $<$ 0,001 dan t hitung yang bernilai 3,923 $>$ t tabel 1,98525 juga mendukung bahwa pengetahuan pajak (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. **Pengujian Hipotesis Kedua**
 Variabel sanksi pajak (X2) dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sehingga hipotesis kedua diterima. Hal tersebut dikarenakan pengaruh sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan pajak memiliki nilai signifikan $<$ 0,05 yaitu sebesar 0,042 dan t hitung yang bernilai 2,063 $>$ t tabel 1,98525 juga mendukung bahwa sanksi pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. **Pengujian Hipotesis Ketiga**
 Variabel kesadaran wajib pajak (X3) dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hal tersebut dikarenakan pengaruh kesadaran wajib pajak (X3) terhadap kepatuhan pajak tidak memiliki nilai signifikan $<$ 0,05 yaitu sebesar 0,168 dan t hitung yang bernilai 1,390 $<$ t tabel 1,98525 juga mendukung bahwa kesadaran wajib pajak (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. **Pengujian Hipotesis Keempat**
 Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X4) dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak, sehingga hipotesis keempat ditolak. Hal tersebut dikarenakan pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan (X4) terhadap kepatuhan pajak tidak memiliki nilai signifikan $<$ 0,05 yaitu sebesar 0,654 dan t hitung yang bernilai -0,449 $<$ t tabel

1,98525 juga mendukung bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan (X4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

9. Uji f simultan

Uji f digunakan untuk menguji goodness of fit model yaitu untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak. Apabila nilai probabilitas $<0,05$ maka model regresi yang digunakan masuk dalam kriteria fit dan layak digunakan.

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	331.438	4	82.859	21.724	$<,001^b$
	Residual	362.352	95	3.814		
	Total	693.790	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikan $<0,01$ dan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa model regresi ini fit karena memiliki nilai signifikansi $<0,05$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Hipotesa 5 dapat diterima, yaitu variabel pengetahuan pajak (X1), variabel sanksi pajak (X2), kesadaran wajib pajak (X3), dan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X4) berpengaruh secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

10. Uji koefisien determinasi

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap perubahan variabel dependen.

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.691 ^a	.478	.456	1.953

a. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas nilai yang diperoleh pada adjusted R square sebesar 0,456 yang dapat diartikan variabel independen dapat mempertegas kepatuhan wajib pajak sebanyak 45,6% dan selanjutnya dicocokkan dengan sampel dan variabel independennya. Kemudian sebanyak 54,4% dipertegas oleh variabel lain di luar penelitian ini.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terkait pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Yogyakarta, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa semakin banyak pengetahuan pajak yang dimiliki maka tingkat kepatuhan pajak juga akan semakin meningkat.
2. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa semakin ketat dan adil sanksi yang dijalankan maka tingkat kepatuhan pajak juga akan semakin meningkat.
3. Variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

F. REFERENSI

- Ainiyah, Iin Nur. 2023. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda.
- Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Capaian Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di DIY Sentuh Rp738 Miliar Hingga Awal Oktober 2023. *Tribun Jogja*. 9 Oktober 2023. 1
- Darmawan, Abel Fatah Rizqi. 2023. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Razia Lapangan, Sarana E-Samsat, Dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Pada Samsat Di Kota Yogyakarta. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak, Fungsi Pajak, 25 Juli 2024 <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Farandy, Muhammad Rafli. 2018. Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Purbalingga). Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Ghozali, I Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS19 (5th Ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, I. Aplikasi Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang. 2018
- Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. IV. Jakarta: BP Universitas Diponegoro.
- Gifari, Marini Ayu. 2022. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan Dan Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Samsat Kota Yogyakarta). Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Hardiningsih, P. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Vol.3, In *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 126-143.
- Heriantoni, Jerry. 2023. Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

- (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman). Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Indrayanti, Ni Made Meisintia Dan Mahaputra, I Nyoman Kusuma Adnyana Dan Sudiartana, I Made. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kharisma*, Vol.4 No.2. Hal:115-125.
- Kowel, Viva A Dan Kalangi, Lintje Dan Tangkuman, Steven. 2019. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, Vol.7 No.3, Hal: 4251-4260
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. 18 Th Ed. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho, Firman Adi. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Yogyakarta). Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Prabowo, Muchamad Novel. 2023. Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
- Ratnasari, Deti. 2020. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, Vol.01 No.03, Hal:11-21
- Kholis, Nur Dan Hapsari, Anita. 2020. Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, Vol.4 No.1, Halaman 56-67.
- Robbins, S.P, & Judge, T.A. (2008). *Perilaku Organisasi* (12th Ed). Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Stefani., Dan Halimatusyadiah. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi* Vol.8 No.1 Februari 2018
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suryani, & Hendryadi. (2015). *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. (Suwito, Ed.) (1st Ed.). Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Transportasi Dalam Angka Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022